



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1907/DJA/KP4.1.2/IX/2024 2 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (Dua) Lampiran
Hal : Penugasan Hakim sebagai Responden
dalam Survei Integritas Hakim Tahun 2024

Yth. 1. Para Ketua, Para Wakil Ketua, Para Hakim Tinggi
pada Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama;
2. Para Ketua, Para Wakil Ketua, Para Hakim
pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama.
(Daftar Satuan Kerja Terlampir)

di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 297/SET/PR.07.01/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 hal Permohonan Izin (surat terlampir), bersama ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama menugaskan Saudara untuk menjadi responden dalam Survei/Wawancara Integritas Hakim Tahun 2024 yang akan dilaksanakan secara langsung oleh PT. Comlec Indonesia terhadap sejumlah Hakim pada satuan kerja sebagaimana daftar terlampir dengan narahubung Sdr. Aran (HP 0896 3998 8404) dan Sdri. Eni (HP 0858 1754 8027).

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Y.M. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Komisi Yudisial RI.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran
Surat Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama
Nomor : 1907/DJA/KP4.1.2/IX/2024
Tanggal : 2 September 2024

**Daftar Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama
dalam Survei Integritas Hakim pada Setiap Provinsi
Tahun 2024**

Provinsi	Satuan Kerja
ACEH	Mahkamah Syar'iyah Aceh
	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
	Mahkamah Syar'iyah Sigli
SUMATERA UTARA	Pengadilan Tinggi Agama Medan
	Pengadilan Agama Medan
SUMATERA BARAT	Pengadilan Tinggi Agama Padang
	Pengadilan Agama Padang
RIAU	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
	Pengadilan Agama Pekanbaru
	Pengadilan Agama Bangkinang
KEPULAUAN RIAU	Pengadilan Agama Batam
JAMBI	Pengadilan Tinggi Agama Jambi
	Pengadilan Agama Jambi
SUMATERA SELATAN	Pengadilan Tinggi Agama Palembang
	Pengadilan Agama Palembang
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung
	Pengadilaan Agama Pangkalpinang
BENGKULU	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
	Pengadilan Agama Bengkulu
LAMPUNG	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
	Pengadilan Agama Tanjung Karang
	Pengadilan Agama Metro
DKI JAKARTA	Pengadilan Agama Jakarta Barat
	Pengadilan Agama Jakarta Timur
	Pengadilan Agama Jakarta Utara
JAWA BARAT	Pengadilan Tinggi Agama Bandung
	Pengadilan Agama Bandung
	Pengadilan Agama Bogor
	Pengadilan Agama Indramayu
	Pengadilan Agama Tasikmalaya
	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
BANTEN	Pengadilan Tinggi Agama Banten
	Pengadilan Agama Serang

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Provinsi	Satuan Kerja
JAWA TENGAH	Pengadilan Tinggi Agama Semarang
	Pengadilan Agama Semarang
	Pengadilan Agama Surakarta
	Pengadilan Agama Boyolali
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
	Pengadilan Agama Yogyakarta
JAWA TIMUR	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
	Pengadilan Agama Surabaya
	Pengadilan Agama Sidoarjo
	Pengadilan Agama Gresik
KALIMANTAN BARAT	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
	Pengadilan Agama Pontianak
KALIMANTAN TENGAH	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
	Pengadilan Agama Palangkaraya
KALIMANTAN SELATAN	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
	Pengadilan Agama Banjarmasin
KALIMANTAN TIMUR	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
	Pengadilan Agama Samarinda
	Pengadilan Agama Balikpapan
KALIMANTAN UTARA	Pengadilan Agama Tarakan
SULAWESI UTARA	Pengadilan Tinggi Agama Manado
	Pengadilan Agama Manado
GORONTALO	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
	Pengadilan Agama Gorontalo
SULAWESI TENGAH	Pengadilan Tinggi Agama Palu
	Pengadilan Agama Palu
SULAWESI SELATAN	Pengadilan Tinggi Agama Makassar
	Pengadilan Agama Makassar
SULAWESI BARAT	Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat
SULAWESI TENGGARA	Pengadilan Tinggi Agama Kendari
	Pengadilan Agama Kendari
BALI	Pengadilan Tinggi Agama Bali
	Pengadilan Agama Denpasar
NUSA TENGGARA BARAT	Pengadilan Tinggi Agama Mataram
	Pengadilan Agama Mataram
	Pengadilan Agama Praya
NUSA TENGGARA TIMUR	Pengadilan Tinggi Agama Kupang
	Pengadilan Agama Kupang
MALUKU	Pengadilan Tinggi Agama Ambon
	Pengadilan Agama Ambon
MALUKU UTARA	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
	Pengadilan Agama Ternate
PAPUA BARAT	Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
	Pengadilan Agama Manokwari

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Provinsi	Satuan Kerja
PAPUA	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
	Pengadilan Agama Jayapura



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor : 297/SET/PR.07.01/08/2024 Jakarta, 27 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Permohonan Izin

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Jenderal A. Yani Kav. 58 – By Pass Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 1871/PIM/PR.07.01/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Indeks Integritas Hakim tahun 2024 yang mendukung arah kebijakan Pembangunan Bidang Hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 pada isu Strategis Penegakan Hukum Nasional dalam Bab VIII ditetapkan menjadi salah satu Program Prioritas Nasional Komisi Yudisial Republik Indonesia di Tahun 2024 dan hasilnya yang berupa Indeks Integritas Hakim menjadi salah satu Data Prioritas Nasional Tahun 2024 pada Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan izin terhadap pelaksanaan, pemetaan wilayah, wawancara, dan pengambilan data hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding, hakim yustisial dan/atau hakim agung di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh PT. Comlec Indonesia sebagai pelaksana survei dalam rangka membangun Indeks Integritas Hakim tahun 2024. Adapun narahubung kegiatan ini adalah Sdr. Aran dengan nomor HP 089639988404 dan Sdri. Eni 0858-1754-8027.

Demikian...

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Arie Sudihar

Tembusan :

1. Yth. Pimpinan Komisi Yudisial RI;
2. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial;
4. Yth. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
5. Yth. Para Ketua Pengadilan Agama; dan
6. Yth. Pimpinan PT Comlec Indonesia.